Membangun Daya Saing Daerah Berkelanjutan



Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jakarta, 4 Novmberber 2020

Arahan Presiden



"Saya menyadari lima tahun lalu, investasi berbondong-bondong datang tapi yang berhasil berinvestasi hanya sedikit, karena kita tidak bisa eksekusi dan merealisasikan. Perizinan masih bertele-tele, baik di pusat dan daerah sehingga membuat para investor itu balik badan,"

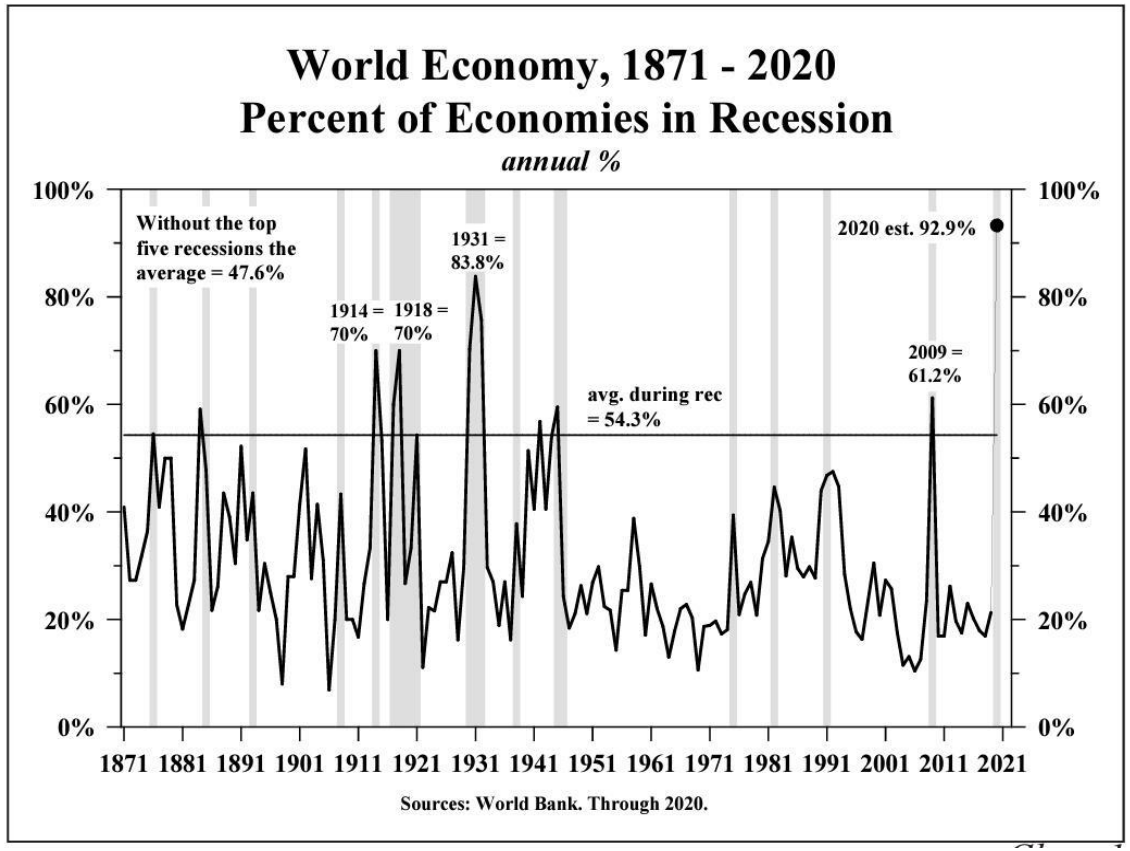
Presiden Joko Widodo
saat Pembukaan Musrembangnas 2019

Arahan Presiden : Musrenbangnas 2019

Jakarta, 9 Mei 2019

Sumber: http://ksp.go.id, 2019

93% negara di dunia berada dalam resesi di tahun 2020



- World Bank menyatakan bahwa 92,9% dari negara di dunia berada dalam resesi di tahun 2020.
- Level ini di atas Great Depression yaitu 83,8%. Terdapat 14 resesi global dari tahun 1871 hingga 2020.

Source: World Bank, 2020

Perkembangan ekonomi global



Perang Dagang AS dan RRT



Keluarnya Kerajaan Inggris dari Uni Eropa



Anjloknya harga minyak dunia



Deglobalisasi: proteksionisme ekonomi domestik kembali marak

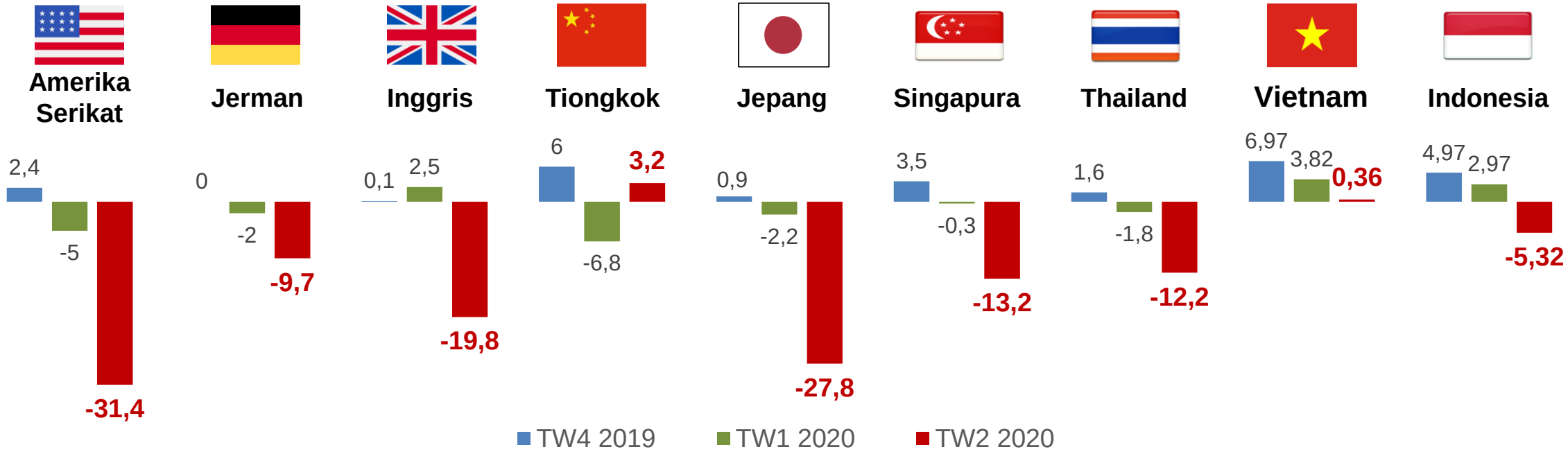


Deglobalisasi: diversifikasi rantai pasok pasca perang dagang



Teknologi dan COVID-19 mengubah pola kerja dan bisnis

Pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan akibat pandemi pada TW II 2020



Dampak Negatif Pandemi terhadap Perekonomian Indonesia



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q2 **turun sebesar 5,32%**



FDI global diprediksi turun 30-40%. Realisasi PMA di Indonesia pada TW III **naik sebesar 1,1% (YoY)**



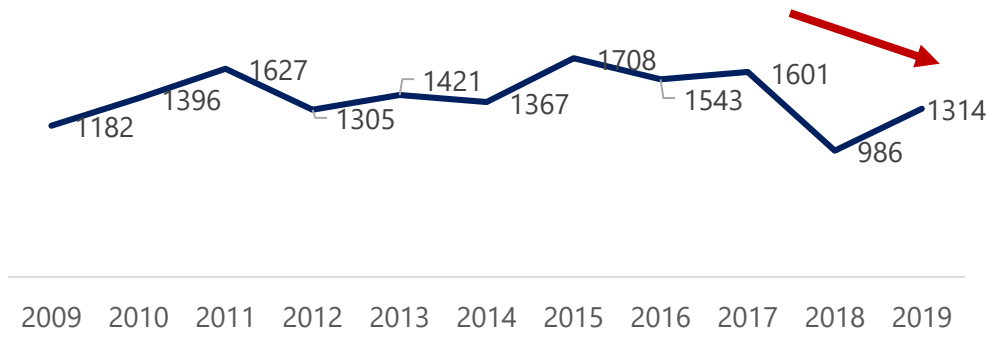
5 Juta TKI terkena dampak negatif pandemi (PHK, dirumahkan, dll)

Sumber: GSO Vietnam; National Statistics of Thailand; Singstats; DOSM Malaysia; BPS, Ministry of Economy.

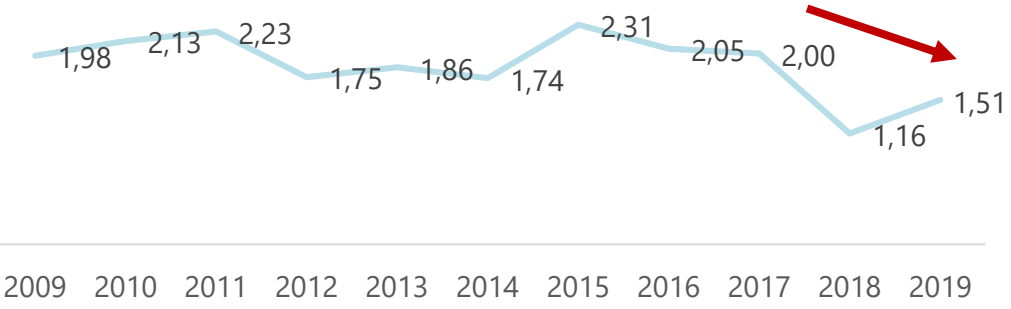
Investasi global mengalami tren penurunan, namun investasi masuk ke kawasan ASEAN masih bertumbuh

Tren penurunan global lebih terlihat dalam %FDI terhadap GDP yang porsinya semakin menurun

FDI Global, 2009 – 2019 (dalam miliar USD)



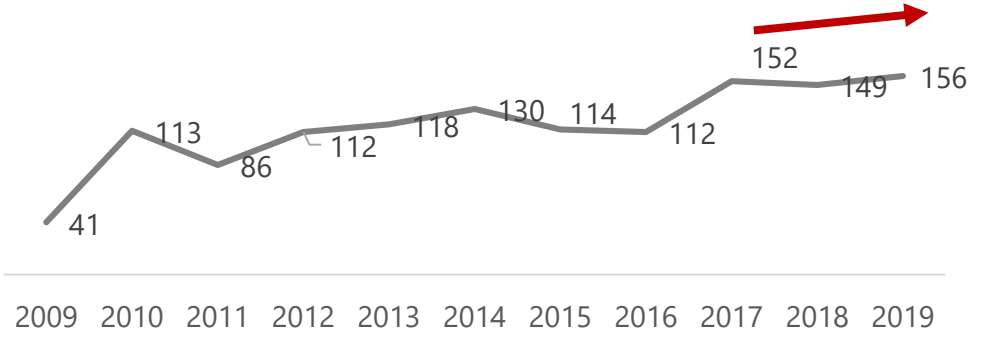
FDI Global, 2009 – 2019 (dalam % GDP)



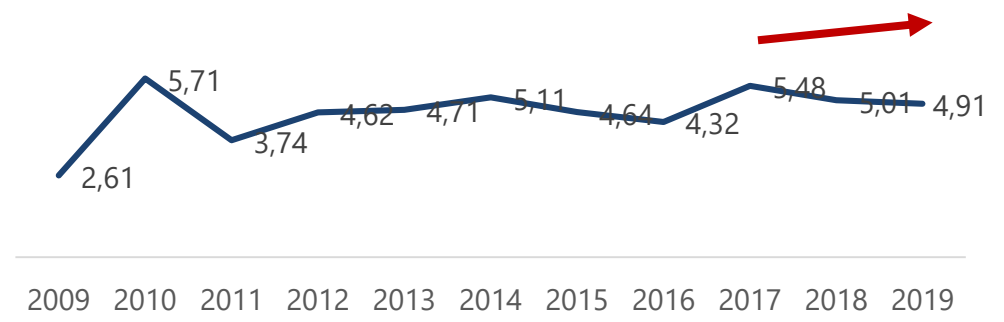
Sumber: UNCTAD

Nilai investasi masuk ASEAN bertumbuh dengan baik dalam 3 tahun terakhir, dan mencapai 5% terhadap GDP

FDI Inward ASEAN, 2009 – 2019 (dalam miliar USD)



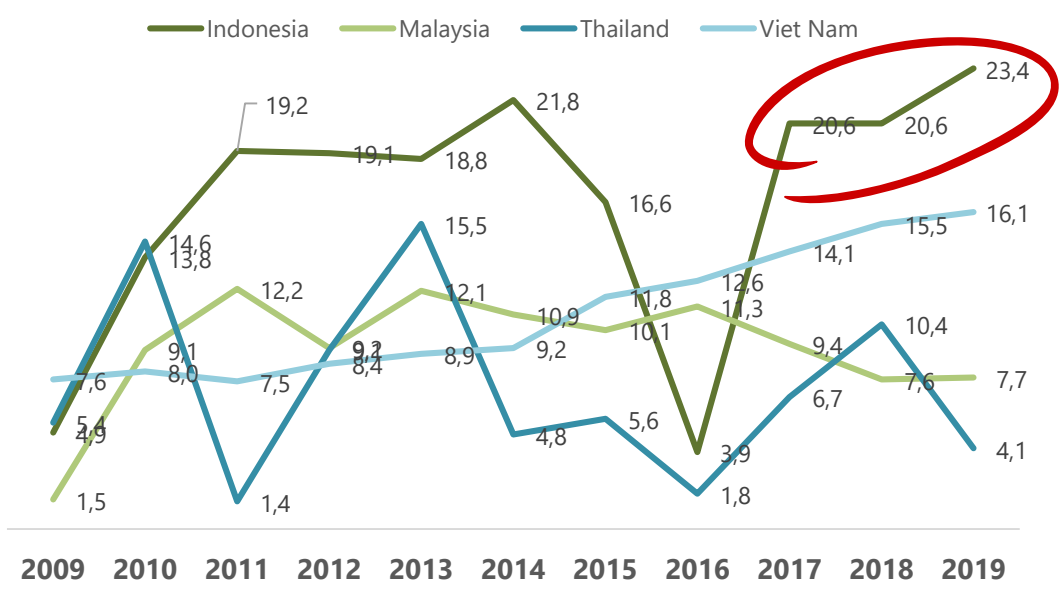
FDI Inward ASEAN, 2009 – 2019 (dalam % GDP)



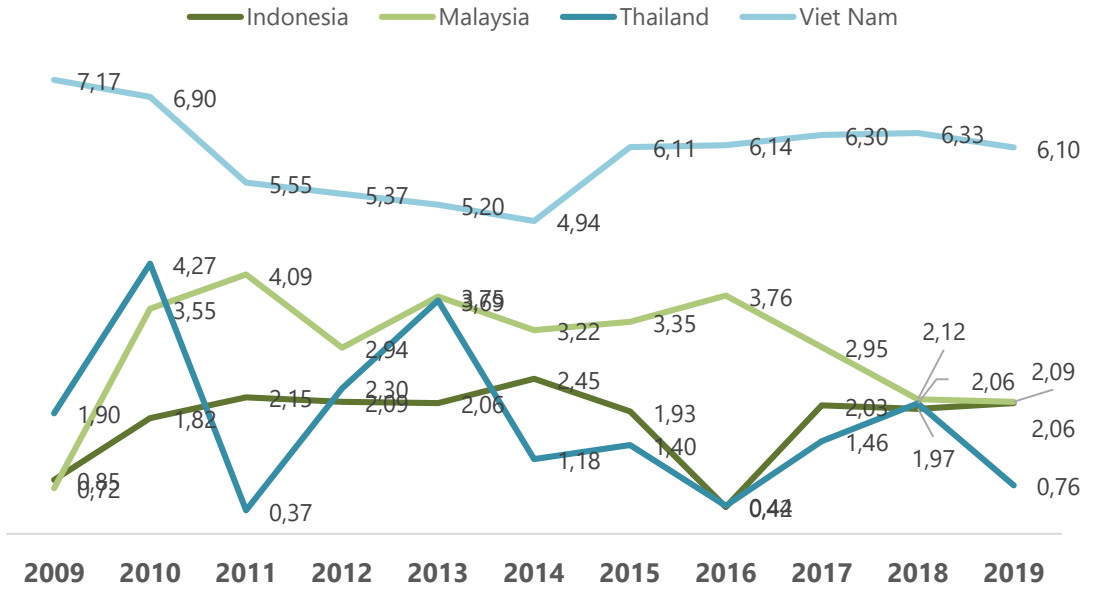
Bagaimana tren investasi yang masuk ke Indonesia dan negara tetangga?

Indonesia masih memimpin nilai investasi masuk dalam 3 tahun terakhir. Vietnam bertumbuh secara konsisten, dan memiliki porsi investasi masuk terhadap GDP paling tinggi.

FDI Inward, 2009 – 2019 (dalam miliar USD)



FDI Inward, 2009-2019 (dalam % GDP)

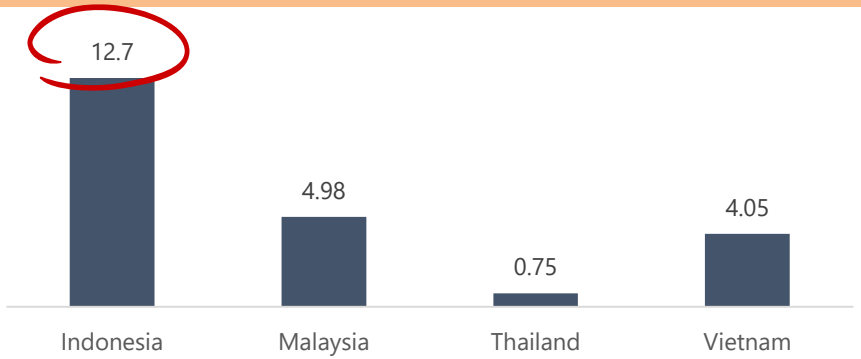


Sumber: UNCTAD

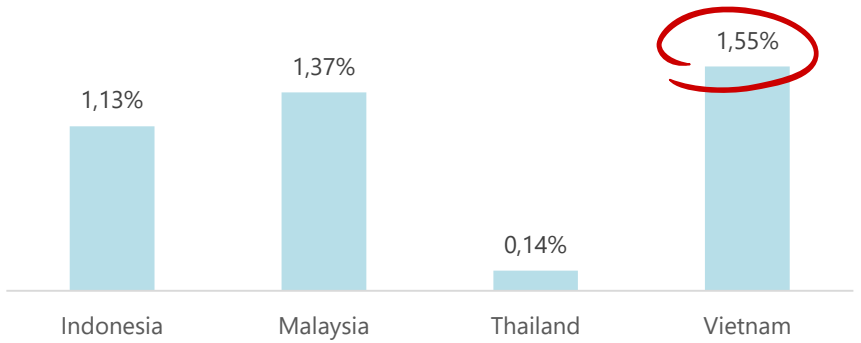
Di tahun 2020, Indonesia masih mendominasi nilai investasi masuk

Meskipun Indonesia menerima nilai investasi masuk terbesar, Vietnam tetap memiliki porsi FDI terhadap GDP yang tertinggi

FDI Inward, YTD June 2020 (dalam miliar USD)



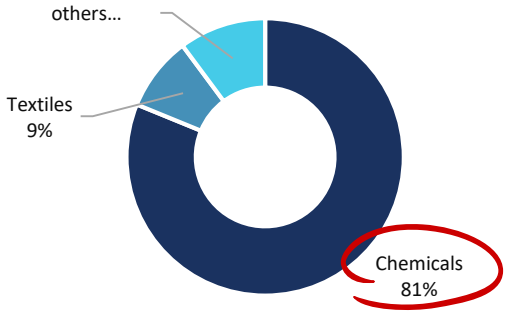
FDI Inward, YTD June 2020 (dalam % GDP)



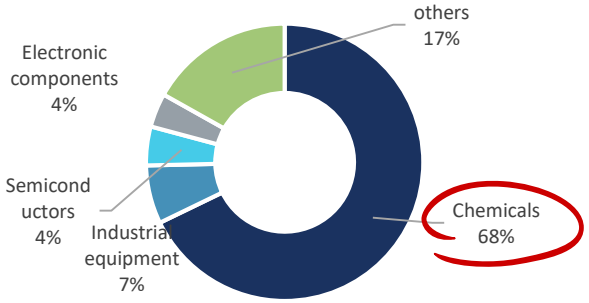
Sumber: fDi Markets, until June 2020

FDI Indonesia dan Malaysia didominasi oleh sektor kimia, Thailand di otomotif sementara Vietnam di *renewable energy*.

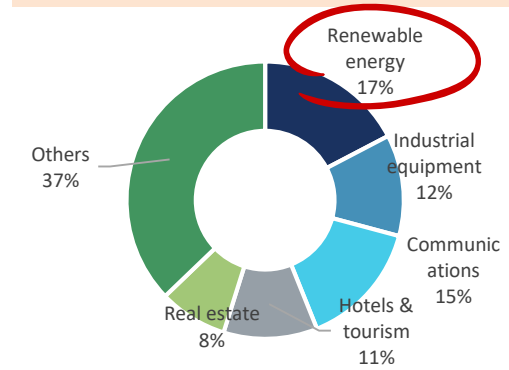
FDI berdasarkan Sektor: Indonesia (dalam %)



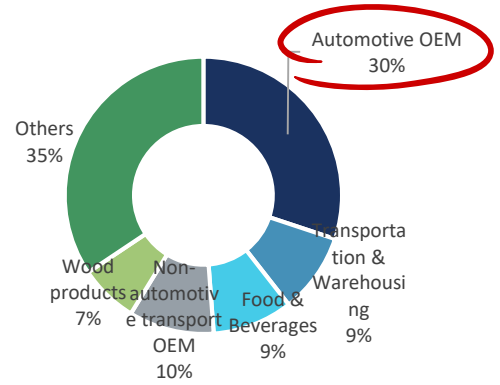
FDI berdasarkan Sektor: Malaysia (dalam %)



FDI berdasarkan Sektor: Vietnam (dalam %)



FDI berdasarkan Sektor: Thailand (dalam %)



Perkembangan realisasi investasi Indonesia Januari – September Tahun 2020
(tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan)

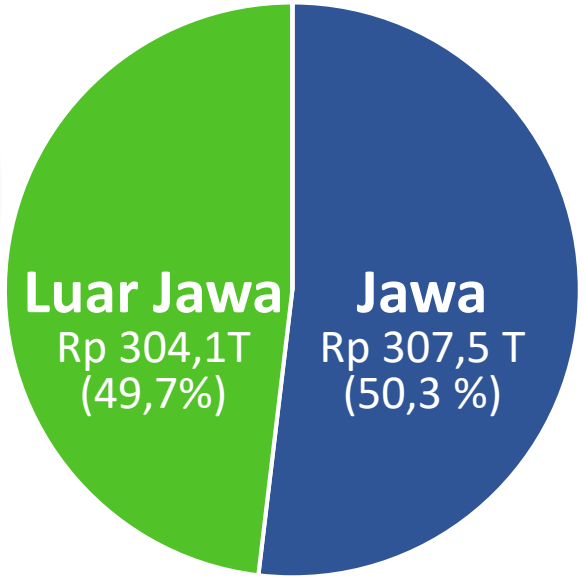
Realisasi Investasi Jan – Sept 2020

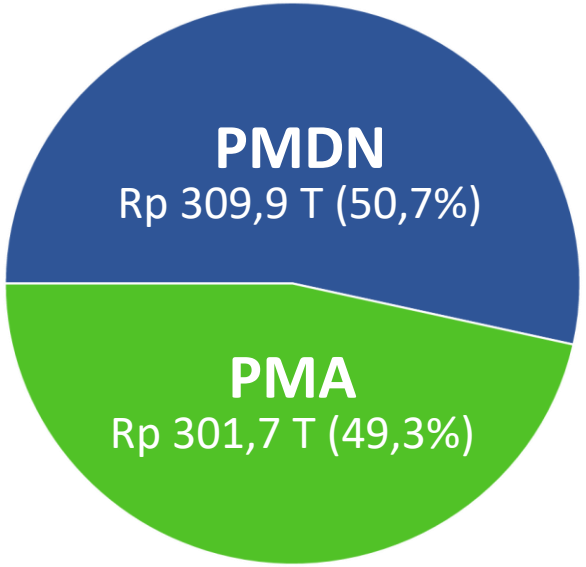
Rp 611,6 T

Realisasi Investasi Jan – Sept 2019

Rp 601,3 T







SEPANJANG JAN – SEP 2020
INVESTASI MENYERAP (TKI)

861.581

Sumber: BKPM, 2020

Target Investasi 2020 s.d 2024

No	Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Renstra BKPM 2020-2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
SS.1 Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	**Nilai realisasi penanaman modal**	**Rp Triliun**	**817,2**	**858,5**	**968,4**	**1.099,8**	**1.239,3**
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3%	49,0%	49,7%	50,6%	51,7%
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8%	49,7%	50,3%	51,9%	53,1%

Total Realisasi Investasi Tahun 2015 s.d 2019 sebesar **Rp. 3.381,9 T**



Target Investasi Tahun 2020 s.d 2024 sebesar **Rp. 4.983,2 T**

Sumber : Renstra BKPM 2020 – 2024

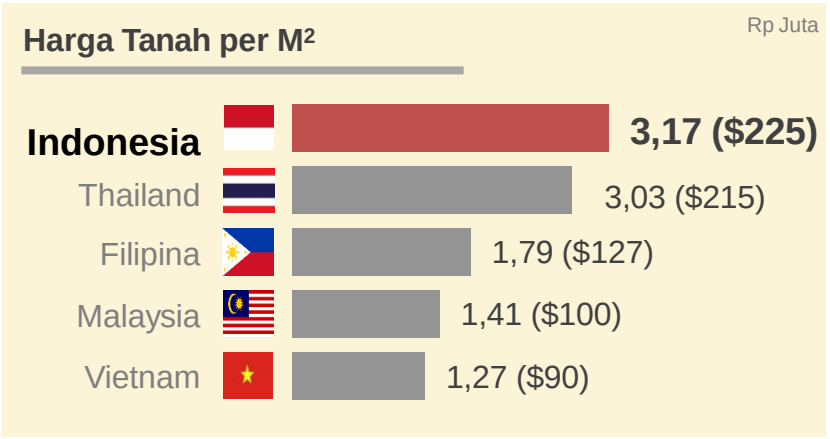
Komparasi Kemudahan Berusaha antar Negara ASEAN 2014 – 2020

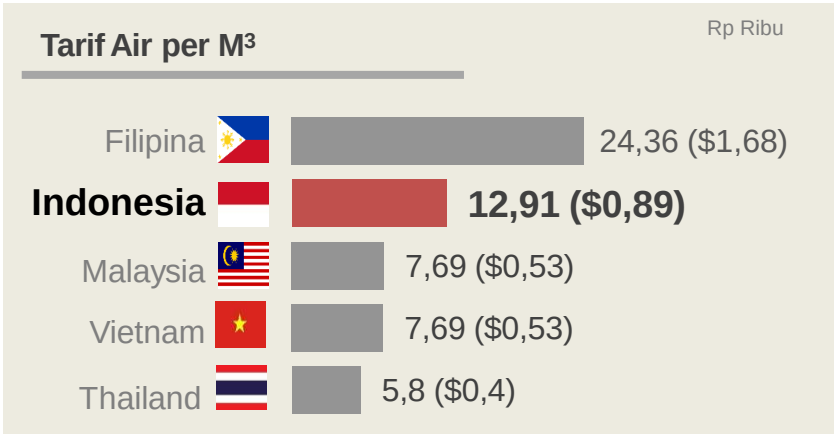


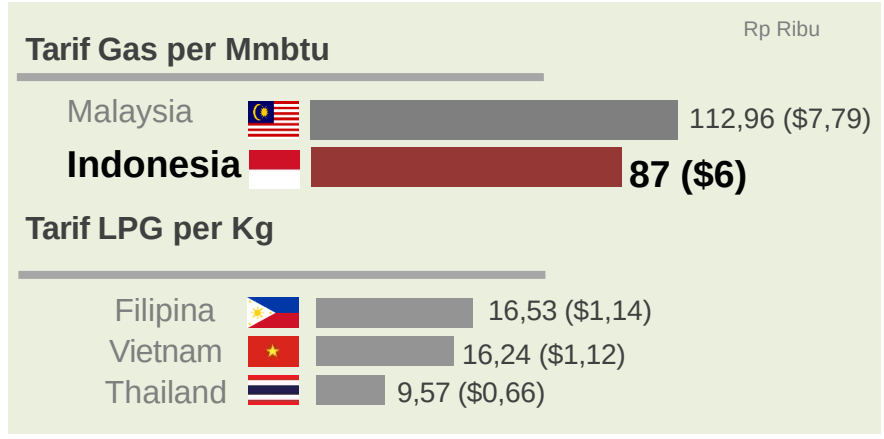
Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Klasifikasi
Singapura	1	1	1	2	2	2	2	Sangat Mudah
Malaysia	6	18	18	23	24	15	12	Sangat Mudah
Thailand	18	26	49	46	26	27	21	Sangat Mudah
Brunei Darussalam	59	101	84	72	56	55	66	Mudah
Vietnam	99	78	90	82	68	69	70	Mudah
Indonesia	120	114	109	91	72	73	73	Mudah
Filipina	108	95	103	99	113	124	95	Mudah
Kamboja	137	135	127	131	135	138	144	Medium
Laos	159	148	134	139	141	154	154	Di bawah Rata-Rata
Myanmar	182	177	167	170	171	172	165	Di bawah Rata-Rata

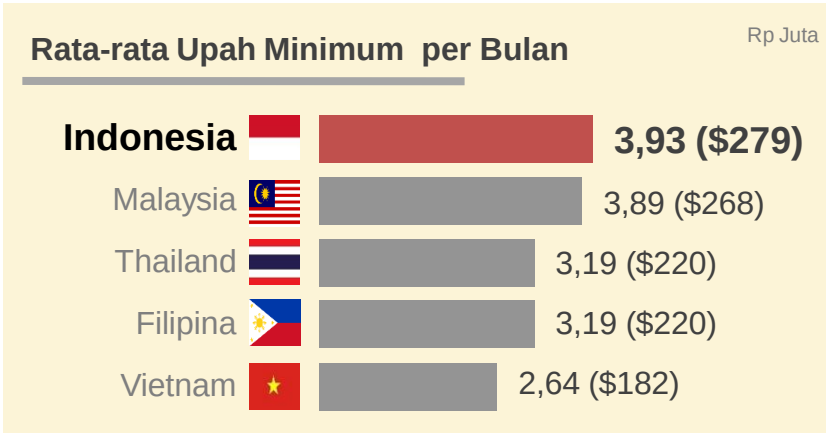
Sumber: World Bank, 2020

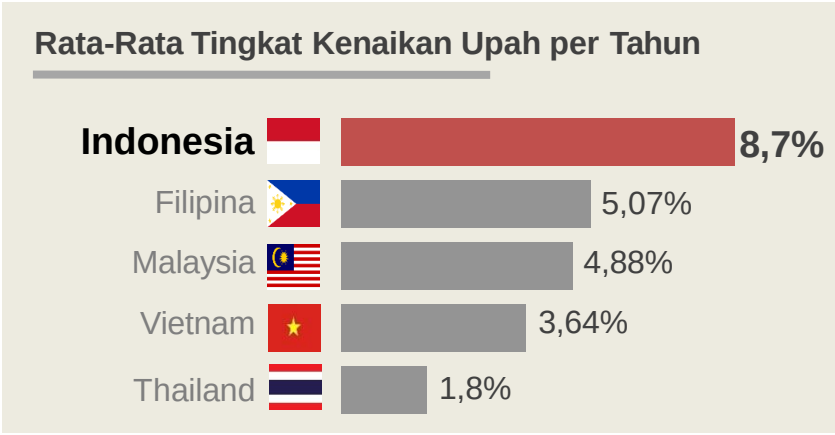
Kondisi objektif daya saing dasar di 5 Negara ASEAN

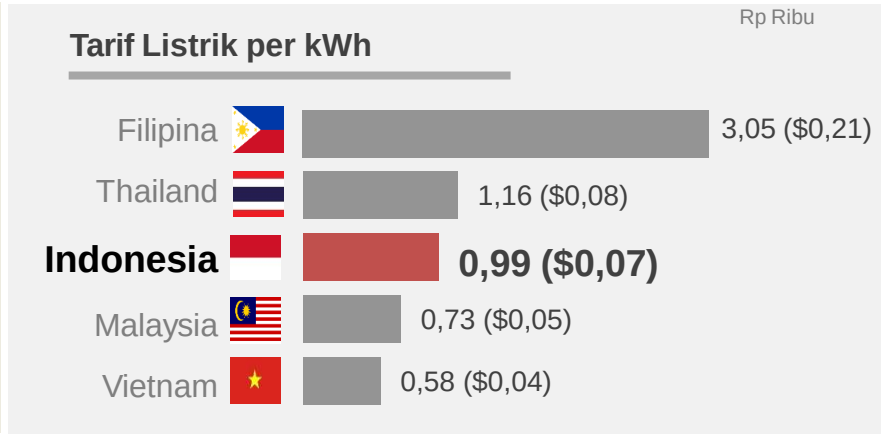




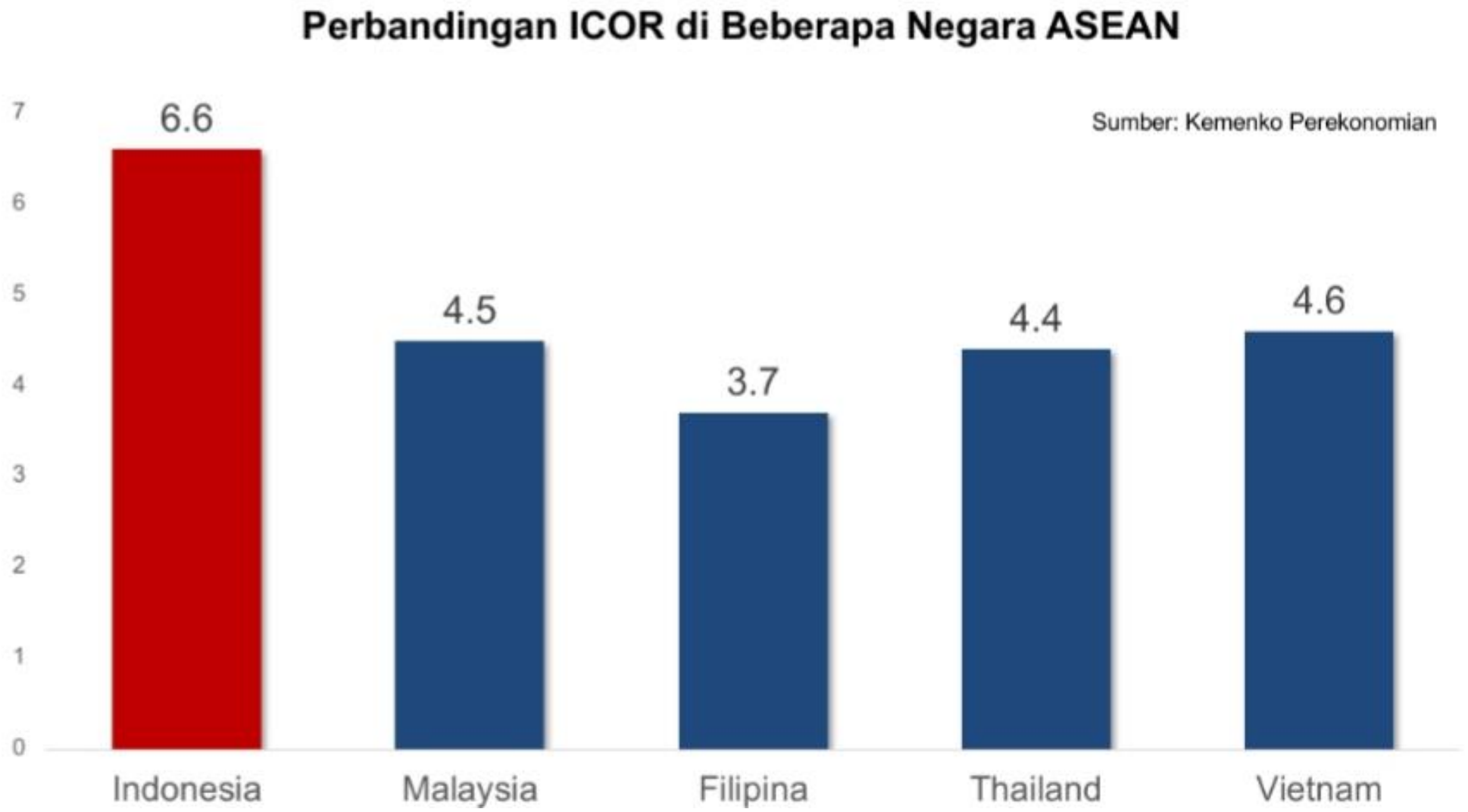








Tingkat rasio produktivitas (ICOR) Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara lain (2018)



Strategi BKPM untuk mewujudkan pemerataan investasi di seluruh Indonesia



Eksekusi realisasi investasi besar



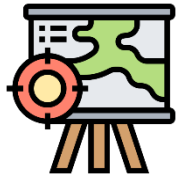
Perbaikan peringkat Kemudahan Berusaha (*Doing Business*)



Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek



Penyebaran investasi berkualitas



Promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara



Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN, khususnya UMKM

a. **Memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan atas pajak penghasilan badan** untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)
b. **Melakukan eksekusi realisasi investasi proyek besar** berupa pengawalan investasi mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan di lapangan serta melakukan kunjungan lapangan, khususnya untuk wilayah-wilayah timur;
c. **Berkoordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah** dalam rangka memfasilitasi hambatan-hambatan yang dialami perusahaan.

Kolaborasi BKPM dengan Pemda dalam rangka menggerakkan investasi ke daerah

1. Dibentuknya Satgas yang bertugas mengawal permasalahan investasi di daerah dan menarik peluang investasi dampak relokasi perang dagang USA-China ke Indonesia

2. BKPM mengadakan pertemuan dengan daerah di awal tahun 2020 berupa Rapat Koordinasi Nasional Investasi

3. BKPM juga kunjungan lapangan ke daerah untuk memotret kondisi aktual perizinan berusaha di lapangan

Potensi Realisasi Investasi Rp 708 Triliun yang Sedang Difasilitasi oleh BKPM

Rp 708,0T

Potensi Realisasi investasi

±Rp 416,8T (58,9%)

Nilai potensi investasi telah difasilitasi



Menyelesaikan permasalahan investasi mangkrak yang ada di Indonesia merupakan salah satu **strategi promosi** untuk menarik minat investor



Klaten, Jawa Tengah



Dumai, Riau



Perusahaan yang selesai difasilitasi:

Rosneft	**211,9** (Rp triliun)	VALE PT. VALE INDONESIA Tbk	**39,2** (Rp triliun)	KOBEXINDO we grow together.	**14,0** (Rp triliun)
YTL Power YTL GROUP **(Tanjung Jati Power)**	**38,0** (Rp triliun)	LOTTE CHEMICAL	**61,2** (Rp triliun)	bp	**1,0** (Rp triliun)
HYUNDAI	**21,7** (Rp triliun)	NINDYA	**9,5** (Rp triliun)	tlb **(Tenaga Listrik Bengkulu)**	**5,2** (Rp triliun)
GCL PT GCL INDO TENAGA	**2,7** (Rp triliun)	CJ CHEILJEDANG	**2,4** (Rp triliun)	Minahasa Cahaya Lestari	**1,8** (Rp triliun)
ANJ Agri **(Galempa Sejahtera Bersama)**	**2,0** (Rp triliun)	Masdar A MUBADALA COMPANY	**1,8** (Rp triliun)	**Lain-Lain**	**1,4** (Rp triliun)
PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP)	**1,8** (Rp triliun)	MALINDO	**1,1** (Rp triliun)		

BKPM tidak hanya memfasilitasi permasalahan investasi besar, tetapi juga investasi menengah & kecil

Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke Industri berbasis nilai tambah (hilirisasi)

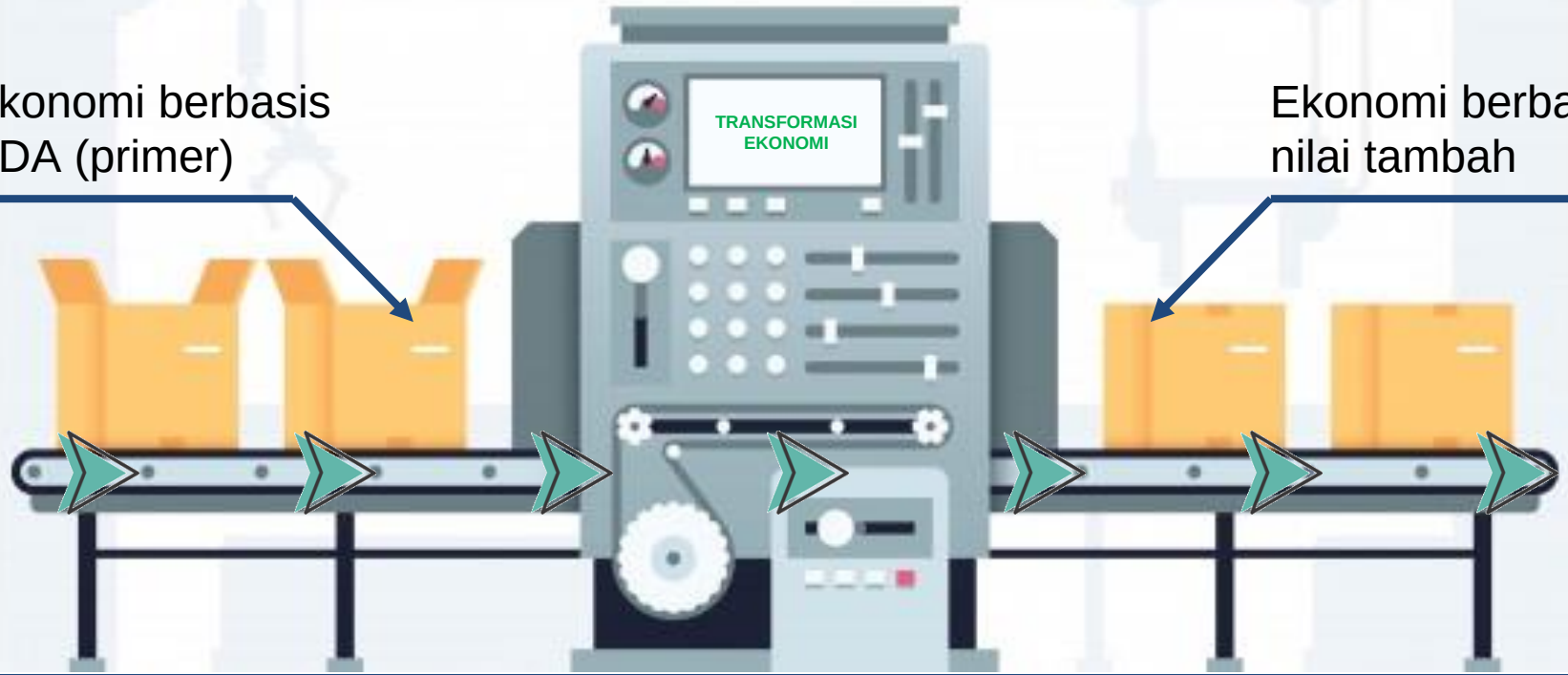
Diperlukan transformasi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional





Ekonomi berbasis SDA (primer)

Fokus pada SDA yang menjadi keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain, contoh: nikel



Ekonomi berbasis nilai tambah



Fokus pada hilirisasi industri

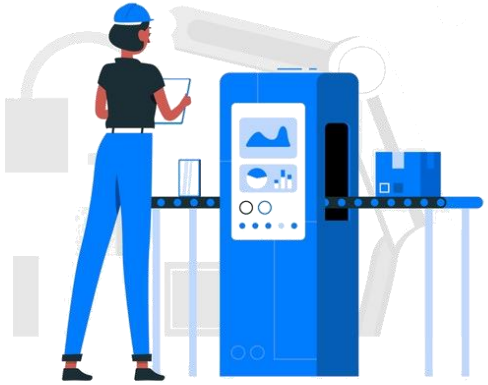
Sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah



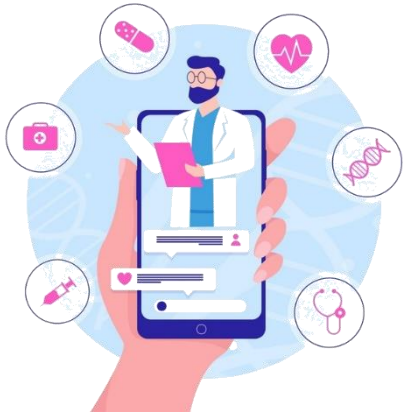
ENERGI



PERTAMBANGAN



MANUFAKTUR
PADAT KARYA



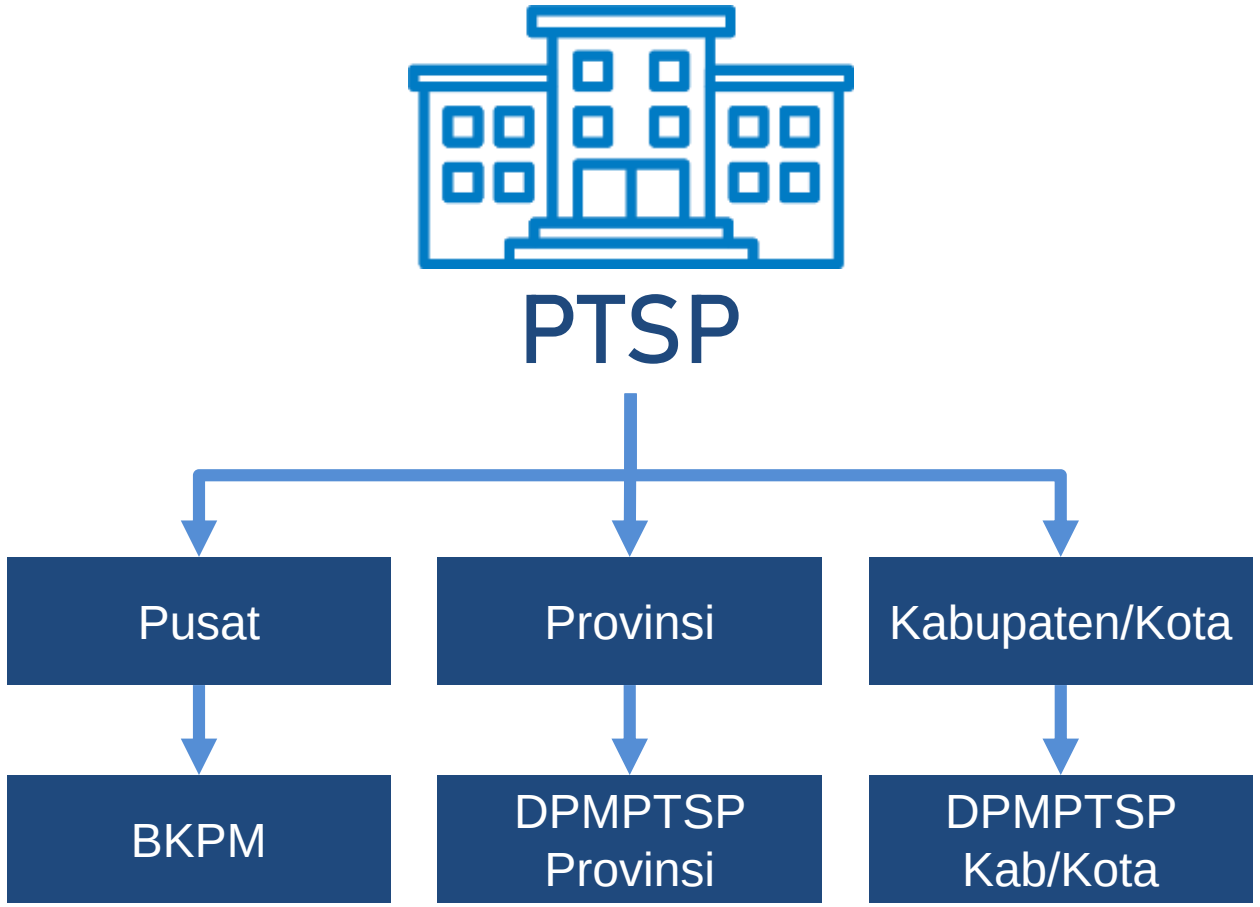
ALAT KESEHATAN
DAN FARMASI



INFRASTRUKTUR

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Perpres 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah

Surat Mendagri Nomor 067/14066/SJ dan 067/14067/SJ tanggal 16 Desember 2019 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota:

1. Mendelegasikan seluruh **kewenangan perizinan dan nonperizinan** kepada Kepala DPMPTSP;
2. **Mengevaluasi, membatalkan dan/atau merevisi** Perda dan Perkada yang menghambat;
3. Mengoptimalkan peran DPMPTSP secara elektronik melalui oss yang terintegrasi dengan **SiCantik *Cloud;***
4. Proses perizinan dan nonperizinan **sesuai aturan yang berlaku dan mengintegrasikan SOP**;
5. **Mengoptimalkan** penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatkan komitmen dalam **pengalokasian anggaran operasional** DPMPTSP; dan
7. Melaporkan **permasalahan dan hambatan** pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemantauan Pelaksanaan PM

Kegiatan kunjungan ke lapangan/lokasi proyek untuk memperoleh data perkembangan kemajuan proyek (realisasi investasi dan inventarisasi permasalahan)

Output :
- **Profil Proyek**
- **LKPM**
- **Data Kumulatif Realisasi Investasi**
- **Data permasalahan proyek**

Pengawasan Pelaksanaan PM

Kegiatan kunjungan ke lapangan/lokasi proyek untuk mengawasi/mengecek kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan penanaman modal

Output :
- **BAP Pengawasan**
- **Profil Perusahaan**

Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha

Kegiatan menyelenggarakan acara pertemuan untuk memberikan sosialisasi kebijakan Penanaman Modal, Bimbingan Teknis / Sosialisasi sistem OSS, Bimbingan Teknik Pengembangan Kemitraan Investasi, dan Bimbingan Teknis LKPM Online.

Output :

Pelaku Usaha yang telah memahami penggunaan sistem OSS dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Kewenangan Kegiatan DAK Non Fisik TA 2021

Provinsi

- PMDN sektor industri dengan nilai investasi di atas Rp. 10 Miliar, kecuali sektor strategis
- PMDN yang lokasi proyeknya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi

Kabupaten/ Kota

PMDN sektor industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 10 Miliar dan sektor jasa, kecuali sektor strategis

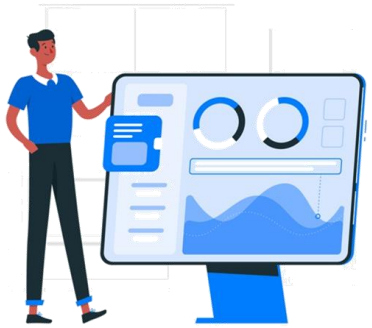
Daerah yang Memperoleh

Seluruh Provinsi (34 Pemerintah Daerah Provinsi) dan Kabupaten/Kota (508 Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota) memperoleh DAK pada 2021 dengan 4 variasi pengelompokan, yaitu :

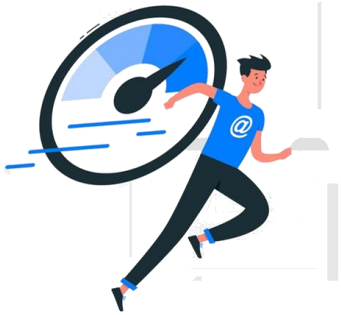
- Provinsi Prioritas
- Provinsi Non Prioritas
- Kabupaten / Kota Prioritas
- Kabupaten / Kota Non Prioritas

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (1)

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP



Peningkatan Kinerja PTSP bagi Pemerintah Daerah
(Pasal 16)



Percepatan Pelaksanaan Berusaha bagi Pemerintah Daerah dan K/L
(Pasal 16)

PERAN BKPM



Menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi (Pasal 17)



Menerbitkan Peraturan BKPM mengenai Penilaian kepada Pemda atas Kinerja PTSP dan K/L atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
(Pasal 19)



Menyampaikan pertimbangan kepada Menkeu dalam pengenaan sanksi dan penghargaan kepada K/L dan Pemda
(Pasal 20)

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (2)

KEMENTERIAN/LEMBAGA



Penghargaan

1. Piagam/tropi penghargaan;
2. Publikasi pada media massa nasional; dan/atau
3. **Insentif**.

Perpres 42/2020 Pasal 7



Sanksi

1. Teguran tertulis;
2. Publikasi pada media massa nasional; dan/atau
3. **Disinsentif anggaran**.

Perpres 42/2020 Pasal 8

PEMERINTAH DAERAH



Penghargaan

1. Piagam/tropi penghargaan;
2. Publikasi pada media massa nasional; dan/atau
3. **Dana Insentif Daerah**.

Perpres 42/2020 Pasal 10



Sanksi

1. Sanksi administratif mengenai pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah; dan
2. **Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil**.

Perpres 42/2020 Pasal 20

Terima Kasih



Indonesia **Investment Promotion** Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t +62 21 525 2008 | f +62 21 525 4945 | e info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | **investindonesia**.go.id